

JURNAL
FUNGSI KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN
WEWENANG SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM



Diajukan oleh :

LUNDU HARAPAN SITUMORANG

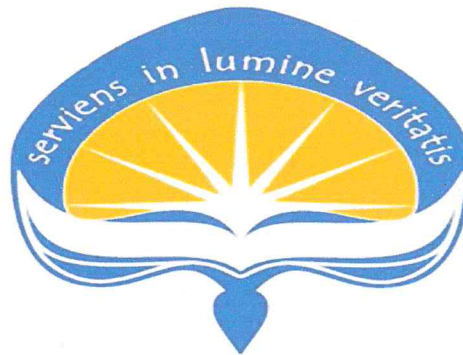
NPM	: 11 05 10579
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**FUNGSI KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN
WEWENANG SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM**



Diajukan oleh :

LUNDU HARAPAN SITUMORANG

NPM : 110510579
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

TelaahdisetujuiOleh Dosen Pembimbing

DosenPembimbing

Tanggal

: 24-11-2016

CH. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum.

TandaTangan

: [Signature]

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atmajaya

**FAKULTAS
HUKUM**

**[Signature]
IX.Endro Susilo,S.H.,LLM**

JURNAL

FUNGSI KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM

Lundu Harapan Situmorang

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Email : lunduharapan@gmail.com

Abstract

This study titled Function Code of Police in Preventing Abuse of Authority As Law Enforcement Officers. The problems of this research is the police code of ethics Is already be applicable to members of the police as law enforcement officers and Are there any obstacles in implementing sanctions against members of the police who violate the code of ethics of the police. The benefits of this research are expected to be useful for the development of legal science in general and in particular to the criminal procedure law of the functioning of the code of conduct of the police in preventing abuse of authority as law enforcement officers. The method used in this study is the use of normative legal research. This study examines the Police Code of Conduct. The conclusion of this study is the regulation of the Police Professional Code of Conduct is not provided an adequate explanation even no explanation at all, the lack of capacity of personnel members Bidpropam as the developer for the internal control function can cover all of that is in charge in the police force. Suggestions from this study is the police who violate the code of ethics police, then penindakannya must be processed in a transparent, firm and responsible. Police as a state apparatus that has a number of police discretion has the potential to violate the law so that the necessary supervision.

Keywords : *Function , The Code of Police , Enforcement , Province of Yogyakarta Special Region*

1. PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui, semua Negara pasti mempunyai peraturan- peraturan dan hukum, begitu juga dengan Negara Indonesia. Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang mempunyai peraturan - peraturan hukum, yang sifatnya memaksa seluruh masyarakat Indonesia harus patuh terhadap peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan hukum di Indonesia bahkan juga memaksa orang asing yang berada di wilayah hukum Indonesia. penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek dalam setiap hukum. siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku berarti

dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenangnya¹.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat serta penegakan hukum. Kepolisian merupakan institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, yang berdiri di garda utama dalam penegakan hukum. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki etika profesi dalam melaksanakan wewenangnya demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari kepolisian itu sendiri. Etika profesi itu ada untuk menciptakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika. hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “ Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. pengemban profesi kepolisian selain memiliki keahlian dalam bidangnya, haruslah bersikap dan berperilaku sesuai kode etik yang mengikat mereka, oleh karena itu setiap profesional kepolisian harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan

warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dibidang hukum dengan beretika.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai aparat negara dan birokrasi pemerintahan. fungsi polisi secara universal adalah membasmi kejahatan (fighting crime), memelihara ketertiban (maintaining law and order) dan melindungi warga dari bahaya (protecting people). karenanya Polisi lazim dirumuskan sebagai badan penegakan hukum (law enforcement agency) sebagai pemelihara ketertiban (order maintenance) sebagai juru damai (peace keeping official) dan pelayanan public (public servant). polisi oleh hokum diberikan wewenang penggunaan kekerasan jika terpaksa dengan tujuan untuk penyelamatan dan penertiban masyarakat. Wewenang ini hanya dioperasikan secara terbatas (bukan penggunaan kekerasan kekerasan total seperti yang dimiliki oleh TNI/militer) karena itu etika profesi kepolisian diharapkan dapat menghindarkan petugas polisi dari tindakan yang emosi, semangat kesukuan, keagamaan dan atau semangat sectarian lainnya .

Tinjauan umum kode etik kepolisian

Kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun ditempat kerja. Sistem norma atau asas tersebut dibuat secara tertulis dan secara tegas menyatakan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut, oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya.

¹ <https://rumputteki.wordpress.com/10>, diakses 5 mei 2016

Kode etik kepolisian Negara Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di lingkungannya. Oleh karena itu, kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang profesional. Dari pengertian kode etik profesi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kode etik kepolisian adalah pengaturan tentang pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan anggota-anggota profesi kepolisian dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Profesi kepolisian mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga kode etik profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri².

Tinjauan umum kepolisian

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat. Selain ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota kepolisian ditengah masyarakat. Terkait dengan kode etik profesi polisi ada beberapa hal yang menjadi sorotan masyarakat terhadap institusi kepolisian itu sendiri. Kepolisian Negara Republik Indonesia dibebani harapan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Indonesia yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya. Profesionalisme polisi mengacu pada adanya sejumlah kemahiran dan pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku, tujuan dan kualitas

pekerjaan polisi. Sebagaimana diketahui bahwa polisi memiliki kewenangan diskresi dalam menjalankan tugasnya, akibat diskresi yang dimiliki kepolisian sering menimbulkan kewenang-wenangan. Polisi dalam setiap tindakannya dibatasi oleh sebuah peraturan yaitu kode etik profesi. Kode etik berperan sebagai penjaga kehormatan profesi kepolisian. Pengertian asas diskresi yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Beberapa peristiwa menunjukkan bahwa Polri dan jajarannya belum mampu memberikan pelayanan dengan baik dan memuaskan kepada masyarakat.

Selama ini Polri sering dituding melindungi anggotanya yang tidak serius menangani kasus-kasus korupsi, HAM, illegal logging, narkoba, perjudian, dan lainnya. Keanehan proses hukum kasus-kasus berskala besar yang menjadi perhatian publik di tubuh Polri, bukan lagi sekadar menyangkut oknum, melainkan Polri sebagai institusi. Untuk itu, Kepala Polri harus memulai tradisi baru untuk memihak dan menghargai anggota Polri yang bekerja sungguh-sungguh, jujur, dan berotak cemerlang.

Sehingga dari penjelasan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut

1. Apakah kode etik kepolisian sudah berfungsi terhadap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum ?
2. Apakah ada kendala dalam menerapkan sanksi terhadap anggota polisi yang melanggar kode etik kepolisian ?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, terfokus pada norma hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan tentang Kode Etik Kepolisian. Dalam

² Suwarni, 2009, Perilaku Polisi, Nusa Media, Hlm 5.

jenis penelitian hukum ini akan dilakukan abstraksi melalui proses deduksi yang kemudian akan dilanjutkan proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan melalui hukum positif.

a. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas :

1. Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- e. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2. Bahan hukum sekunder meliputi :

Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel tentang kode etik Kepolisian, tugas dan wewenang Kepolisian, yang bertujuan untuk mengetahui Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai aparat Penegakkan Hukum

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus Bahasa Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

b. cara pengumpulan data

1. Study Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang cara memperoleh datanya dilakukan dengan mencari, menemukan berbagai peraturan perundang undangan maupun pendapat hukum yang berupa literatur, internet, jurnal hasil penelitian, surat kabar dan majalah ilmiah.
- 2 Wawancara dengan narasumber ,wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka artinya bahwa pertanyaan belum disertai dengan jawabannya, sehingga narasumber menjawab berdasarkan pada keahlian profesi atau jabatannya.

c. Analisa data

data yang diperoleh di kumpulkan dan dipilah-pilah sesuai dengan permasalahan kemudian diambil yang diperlukan. setelah dikelompokkan sesuai dengan permasalahan kemudian dianalisis dengan memahami dan merangkai kata yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang apa yang diteliti kemudian data yang diperoleh disajikan secara deskriptif.

d. Proses berpikir

Dalam menarik kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari penjelasan hal hal yang bersifat umum menuju hal hal penjelasan yang bersifat

husus. Maka disebut proses berfikir secara deduktif.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Tinjauan Mengenai Pengertian Kepolisian

1.Pengertian Kepolisian

Mengacu pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai pengertian dari berbagai hal yang berkaitan dengan kepolisian. tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam perundang-undangan ini yang berbunyi yaitu Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan³.

Secara umum fungsi Kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan Good Governance, yaitu sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang (Pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI).

Pengertian fungsi Kepolisian di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat,dan dalam hal ini pengertian Kepolisian sebagai suatu lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.sehingga pengertian kepolisian mencakup tentang fungsi kepolisian sebagai fungsi pemerintahan dan kepolisian sebagai organ pemerintahan atau suatu lembaga pemerintahan.

2.Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut berkaitan dengan tugasnya dalam proses penegakan hukum. dalam rangka proses penegakan hukum pidana, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia selain terdapat dalam KUHAP juga terdapat dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mendasarkan setiap tindakannya pada norma hukum, agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. diperlukan adanya kode etik profesi Kepolisian yang dapat membatasi sikap dan perilaku aparat Kepolisian dalam mengemban tugas dan

³ M. Karjadi, 1978, *Polisi (Filsafat Dan Perkembangan Hukumnya)*, Politeia, Hlm 101.

wewenangnyanya di dalam masyarakat maupun di dalam kesatuan korps Kepolisian⁴ian.

Sedangkan wewenang Kepolisian terdapat di dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan

- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tugas Polri masih cukup luas karena keterlibatannya pada wewenang administrasi negara (public administration), wewenang administrasi pengamanan keamanan negara (security and defence administration) dan wewenang administrasi peradilan pidana (administration of criminal justice). dalam hal mengadakan tindakan yang bertanggungjawab sebagaimana yang diharapkan agar tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, yang berarti selaras dengan kewajiban hukum yang melandasi dilakukannya tindakan tersebut. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnyanya Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mendasarkan setiap tindakannya pada norma hukum, agama, kesopanan dan kesusilaan serta. menjunjung tinggi hak asasi manusia. Diperlukan adanya kode etik profesi Kepolisian yang dapat membatasi sikap dan perilaku aparat Kepolisian dalam mengemban tugas dan wewenangnyanya di dalam masyarakat maupun di dalam kesatuan korps Kepolisian.

Sehingga Polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnyanya harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan polisi, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian bisa bersih dan baik. Dengan demikian akan terwujud konsep good police sebagai prasyarat menuju good-governance.

B. Tinjauan Mengenai Kode Etik Kepolisian

1. Pengertian Kode Etik

kode etik adalah suatu sistem norma atau nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar

⁴<http://sosbud.kompasiana.com>, diakses 26 mei 2016 jam 21.00

dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang harus dihindari atau secara singkatnya definisi kode etik yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.

kode etik adalah suatu sistem norma atau nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang harus dihindari atau secara singkatnya definisi kode etik yaitu suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku⁵.

Sedangkan Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang

kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut, oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya.

2. Pengertian Kode Etik Kepolisian

Kode etik bagi profesi Kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Terdapat pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

Polisi adalah hukum yang hidup melalui polisi ini, janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi suatu kenyataan. Sebagai suatu profesi maka di dalam kepolisian diperlukan upaya pemolisian profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki kedudukan yang strategis dalam bidang penegakan hukum. Profesi Polri memiliki standar persyaratan yang bermacam-macam dalam bidang perekrutannya dan merupakan salah satu organisasi yang mengembangkan sendiri suatu pengetahuan teoritis. kepolisian juga merupakan suatu badan yang mempunyai dan melaksanakan kode etik dan memiliki otonomi politik untuk mengontrol

⁵Satjipto Rahardjo, (dalam Sitorus), 2003, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, , h.27-28

nasibnya sendiri. kode etik diperlukan untuk melindungi kalangan profesi ini dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari penjelasan di atas, kode etik juga dapat berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. wujud kode etik polri tersebut sangat erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Polri yaitu menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. kode etik yang dimiliki Kepolisian Republik Indonesia tidak bisa lepas dari keberadaannya sebagai pengayom masyarakat, sehingga hubungan antara masyarakat dan Kepolisian harus berjalan dengan erat dan baik, karena akan mustahil, kode etik polri terwujud apabila masyarakat tidak bisa diajak bekerjasama. tentunya juga, Kepolisian dalam menjalankan kode etik Kepolisian harus memahami⁶ prinsip-prinsip etika profesi luhur Kepolisian.

3. Tujuan Kode Etik Kepolisian

Pada dasarnya tujuannya adalah berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, akan merupakan sarana untuk :

- a Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
- b Mencapai sukses penugasan.
- c Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
- d Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien dan modern, yang bersih

dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Untuk mendukung tujuan kepolisian di atas, polisi juga memiliki tugas- tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengenai tujuan Kode Etik Polisi adalah sebagai berikut :

- a Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum kepolisian.
- b Memantapkan profesionalisme, integritas dan akuntabilitas Anggota Polri
- c Menyamakan pola pikir, sikap dan tindak Anggota Polri
- d Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri dan
- e Memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP

C. Tinjauan Mengenai Mekanisme Penerapan Kode Etik Kepolisian

1. Mekanisme Penerapan Kode Etik

Sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam penerapan Kode Etik Profesi Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya, dan untuk mengetahui sejauh mana kelima faktor tersebut sebagai tolak ukur bagi efektivitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri. Berangkat dari teori inilah faktor-faktor yang menjadi mempengaruhi penerapan Kode Etik

⁶Ibid, Hlm.49.

Profesi Kepolisian sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Polri.

Terkait dengan penyimpangan polisi di Indonesia pada dasarnya telah diantisipasi oleh Polri melalui berbagai instrumen pengawasan terhadap personil polisi. Pertama, melalui keberadaan instrumen legal berupa peraturan. Selain pelanggaran pidana yang secara umum diatur dalam KUHP, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap personilnya, Polri memiliki dua landasan utama yaitu melalui keberadaan peraturan disiplin dan kode etik profesi. Peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui PP No. 2 Tahun 2003. Landasan kedua adalah Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Permasalahannya adalah sulit untuk memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan tersebut. Permasalahan lain selain masalah di atas adalah seringnya peraturan yang mengatur tentang Kode Etik Profesi Polri ini dilakukan perubahan. Sebagaimana diketahui sebelum ditetapkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sebelumnya sudah ada dua Peraturan Kapolri yang mengatur tentang hal yang sama, yaitu Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/32/VII/2003 dan Peraturan Kapolri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006. Artinya, peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian ini sudah dua kali mengalami perubahan. Di samping itu, Peraturan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru ini tidak tersedia penjelasan yang memadai bahkan tidak ada penjelasan sama sekali. Akibat peraturan yang multitafsir tersebut masing-masing pihak akan memiliki penafsiran yang berbeda-beda, sehingga dapat membuka peluang terjadinya manipulasi dalam penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Fungsi Kode Etik Profesi Polri adalah sebagai

pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi Kepolisian yang dijalankannya. Kode etik profesi kepolisian merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Tribata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Pada peraturan sebelumnya etika profesi Polri hanya meliputi etika pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan.

2. Sanksi Terhadap Polisi Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian

Dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 21 dijelaskan bahwa ada tujuh (7) jenis sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dimana anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa :

- a Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
- b Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
- c Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.

- d Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- e Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- f Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan/atau
- g PTDH sebagai anggota Polri.

Pasal 21 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi :

- a Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
- b Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
- c Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.
- d Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau Kode Etik Profesi Polri.
- e Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tigapuluh) hari kerja secara berturut-turut.

f Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa :

- 1 Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian.
 - 2 Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas dan
 - 3 Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya.
 - h Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu dan
 - i Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Selain diatur dalam peraturan kode etik profesi Polri, tingkah laku anggota juga diatur dalam peraturan disiplin yang harus ditaati. apabila anggota tersebut melanggar peraturan disiplin maka anggota akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. bagi anggota yang melanggar peraturan disiplin maka dapat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin⁷.

Tindakan disiplin sesuai yang diatur dalam Pasal 8 undang-undang diatas berupa teguran lisan dan tindakan fisik dan yang berhak untuk menjatuhkan tindakan ini adalah anjum dari anggota tersebut dan hukuman disiplin sesuai yang diatur dalam pasal 9 undang-undang diatas dapat dikenakan sanksi berupa:

- a Teguran tertulis.
- b Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun.
- c Penundaan kenaikan gaji berkala.
- d Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun.
- e Mutasi yang bersifat demosi.
- f Pembebasan dari jabatan.
- g Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

Dari uraian di atas, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Polri serta agar memberikan efek jera bagi setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penindakan harus diproses secara transparan, tegas dan bertanggung jawab. Sehingga setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan pelanggaran administratif dapat menerapkan sanksi tersebut sebagaimana mestinya.

D.Tinjauan Mengenai Kendala Yang Di Hadapi Pimpinan Polisi Dalam Menerapkan Sanksi

Sikap tegas seorang pemimpin sangat diperlukan oleh sebuah organisasi besar seperti Polri.Kode etik kepolisian dalam pelaksanaannya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang kepolisian dewasa ini sudah berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya tetapi belum maksimal, akan tetapi banyak faktor yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran kode etik yang masih kerap dilakukan anggota kepolisian. Kode etik membatasi ruang gerak anggota polri untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan didalam wewengangnya. Sehingga banyak faktor yang menyebabkan kode etik tidak berjalan secara maksimal.

Seperti yang dialami anggota Bidpropam Polda DIY kompol Muhammad Sumarno mengatakan, kendala yang dihadapi Bidpropam dalam menegakkan Kode Etik Profesi Polri antara lain sulitnya untuk melakukan pemahaman yang dilakukan oleh anggota Bidpropam untuk memisahkan secara tegas antara aturan intern Polri seperti antyara peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi. kendala selanjutnya mencakup tentang faktor kesadaran dan kepatutan dari anggota Polri dalam hal ini sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri.Dimana tingkat kesadaran dan kepatutan anggota Polri tersebut atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku bagi setiap anggota Polri masih relatif rendah sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi.Maka sebagai upaya pemulihan dan penegakan hukum pimpinan dalam hal ini dituntut untuk memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik itu sendiri melalui siding Kode Etik.kendala yang terakhir mencakup tentang faktor budaya yang melekat bagi setiap anggota Polri, yaitu adanya rasa segan dari Bidpropam Polda DIY dalam memeriksa anggota Polri yang melakukan

⁷ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 174.

pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Sehingga belum terciptanya supremasi hukum yang diinginkan.

4.KESIMPULAN

1. Kode Etik Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 sudah berfungsi terhadap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum. Sehingga dengan berfungsinya kode etik kepolisian tersebut maka bisa menekan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik kepolisian yang berkaitan dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. dan setiap anggota kepolisian tersebut harus tunduk pada kode etik tersebut.
2. Kepolisian di dalam upaya menerapkan sanksi bagi pelaku pelanggaran Kode Etik Kepolisian ternyata mengalami kendala, antara lain :
 - a Masih rendahnya pemahaman tentang Kode Etik oleh anggota kepolisian dan pemahaman dari Bidpropam sendiri mengenai tipisnya perbedaan antara aturan intern Polri dan Kode Etik Profesi.
 - b Masih adanya rasa segan dari Bidpropam untuk memeriksa koleganya sendiri.

5.DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Koesparmono, I. (2000). Polri Mandiri dan Kebudayaan. Jakarta: Jurnal Polisi Indonesia.
- Kunarto. (2004). Perilaku Organisasi Polri. Jakarta: Citra Manunggal.

L, J., & Sulivan. (1992). Pengantar Ilmu Kepolisian. Jakarta: PPTIK.

Nuh, M. (2011). Etika Profesi Hukum. Jakarta: Pustaka Setia.

Sadjijono. (2010). Memahami Hukum Kepolisian. Jakarta: Laksbang Pressindo.

Suhrawardi K. Lubis, S. (2006). Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Suparlan, & Parsudi. (2007). Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian. Jakarta: Jurnal Polisi Indonesia.

Utomo, W. H. (2008). Hukum Kepolisian di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Website:

<http://e31.blogspot.com/2011/10/makalah-kode-etik-profesi.html>.

<http://www.polri.go.id> Tentang Polri, 6 september 2011

www.suarapembaruan.com/News/2011/08/07/Editor/edit01

www.kamusbahasaonline.com/11/11/2011

<http://www.propam.polri.go.id/?mnu=2>

